



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA



RENCANA KERJA TAHUN 2021 PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA



DENPASAR, OKTOBER 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyelesaikan kegiatan pengendalian pembangunan ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2018 dan sedang melaksanakan kegiatan tahun 2019. Tahun 2019 merupakan tahun ke-lima dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK Tahun 2015-2019, dan tahun 2020 merupakan tahun pertama untuk Rencana Strategis P3E BaliNusra 2020-2024.

Rencana Kerja (Renja) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK tahun 2019 dan 2020 penting untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan komponen unit kegiatan dan elemen kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK Tahun 2020 - 2024. Keberhasilan dan kegagalan untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2019 menjadi evaluasi untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 supaya keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara tahun 2020 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2021 yang kami susun, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk bagi kita semua agar kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK Tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik.

Denpasar, Desember 2020

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara



Drs. Rijaluzzaman

NIP.19801228 1992031 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi	4
BAB II CAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	
2.1 Capaian Indikator Kinerja 2019	9
2.1.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan	10
2.1.2 Capaian Indikator Kinerja pada Unit Kegiatan	12
2.2.3 Capaian Indikator Kinerja pada Elemen Kegiatan	16
2.2 Progres Capaian Renstra 2015-2019 sampai dengan 2019	17
2.3 Prognosis Capaian Kinerja 2020	17
BAB III RENCANA KERJA P3E BALI DAN NUSRA TAHUN 2020	
3.1 Sasaran Kegiatan	21
3.2 Komponen Kegiatan	22
BAB IV PENUTUP	27
BAB V LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Unit Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan di P3E Bali dan Nusra	8
Tabel 2	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan	10
Tabel 3	Capaian Indikator Kinerja TA.2019	11
Tabel 4	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019	11
Tabel 5	Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 sampai dengan 2019	13
Tabel 6	Pencapaian Kinerja Unit Kegiatan Inventarisasi DDDT Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 sampai dengan 2019	13
Tabel 7	Pencapaian Kinerja Unit Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan SDA dan LH Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 sampai dengan 2019	14
Tabel 8	Pencapaian Unit Kegiatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDA dan LH Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 sampai dengan 2019	14
Tabel 9	Pencapaian Kinerja Unit Kegiatan Penyelenggaraan Tata Laksana Perkantoran dan Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 sampai dengan 2019	15
Tabel 10	Capaian Kinerja Elemen Kegiatan P3E Bali dan Nusa Tenggara 2019	16
Tabel 11	Realisasi Anggaran Pertanggal 31 Oktober 2020	18
Tabel 12	Realisasi dan Progres Output Pertanggal 31 Oktober 2020	19
Tabel 13	Output dan Komponen Kegiatan P3E Bali dan Nusra 2020 – 2024	23
Tabel 14	Struktur Anggaran Berdasarkan Belanja Renja TA.2021	25
Tabel 15.	Matriks Rencana Kerja (Renja) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2018	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4
-----------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup dan kehutanan merupakan sektor yang penting dalam keberlangsungan kehidupan, namun dalam kerangka pembangunan nasional sektor lingkungan hidup dan kehutanan hanya merupakan sektor penunjang khususnya dalam sektor unggulan pembangunan nasional 2020-2021.

Dalam kebijakan RKP 2021, sektor lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian proiritas nasional yang berujung dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, mendorong pembangunan ekonomi dan memperkecil kesenjangan pembangunan (*gini ratio*). Sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka proses perencanaan dimulai dari Pada RPJMN IV tahun 2020 – 2024, tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi salah satu pengarus-utamaan yang diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah: Terwujudnya ASN yang profesional; Terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien; Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas yang mulai dielaborasi di dalam RKP setiap tahunnya dan sesuai dengan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 4 Tahun 2017 tentang Rancangan RKP 2021, dengan tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Agar RKP 2021 memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, maka untuk pertama kalinya, Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP.

Beberapa isu penting yang diangkat oleh Sekretariat Jenderal KLHK dalam Rancangan Renstra 2020-2024 diantaranya ialah 1) ASN yang profesional,

berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral melalui penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. 2) Kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan. 3) Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh. 4) Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian LHK secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah.

Untuk menggambarkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, maka disusunlah dokumen Rencana Kerja ini. Dokumen Renja ini disusun secara partisipatif melibatkan seluruh Satker Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal, dengan menggunakan Aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Penganggaran) maupun melalui serangkaian diskusi dan pertemuan untuk membahas output serta komponen kegiatan di dalamnya.

Dalam Rencana Strategis Setjen KLHK tahun 2020-2024, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK telah diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan "pengendalian pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara" dengan sasarannya "Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara".

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK Tahun 2020-2024, maka telah disusun rencana kerja tahunan atau disebut Rencana Kerja (Renja). Pada tahun 2020 penyusunan Renja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK Tahun 2015-2019, serta mengacu pada Renja Setjen KLHK Tahun 2020. Dalam hal penganggaran, penyusunan Renja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Bali dan Nusa Tenggara KLHK Tahun 2021 didasarkan pada pagu anggaran satker lingkup Setjen Tahun 2020.

Rencana Kerja tahun 2021 diinput dalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan Anggaran dan Sistem Informasi Kinerja) dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2021 yang merupakan sistem terpadu antara aplikasi Renja, aplikasi ADIK dan RKA K/L serta aplikasi kinerja yang sebelumnya terpisah. Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK Tahun 2020-2024 telah disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Setjen KLHK Tahun 2020-2024.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dibentuklah Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion di enam (6) wilayah Indonesia, dan salah satunya di Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara, yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

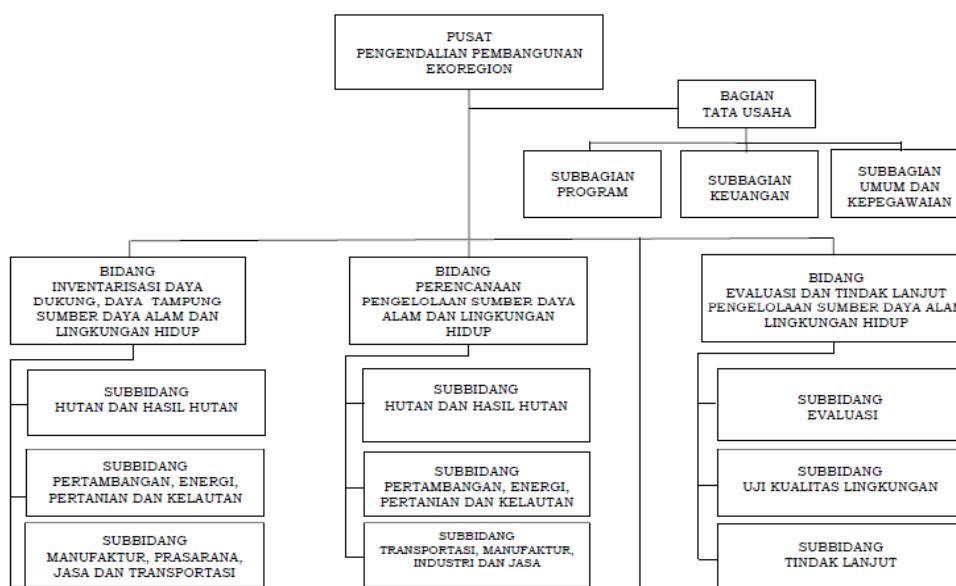
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan ekoregion;
2. Pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
3. Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion; dan
4. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat

1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas 4 (empat) bagian/bidang yaitu; (1) Bagian Tata Usaha; (2) Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (3) Bidang perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (4) Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi di bawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Adapun struktur organisasi Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari 4 (empat) bagian/bidang dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. pengelolaan urusan keuangan; dan

c. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, dan hubungan masyarakat.

Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) sub Bagian yang meliputi:

a. Subbagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

2. Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion. Dalam pelaksanaan tugasnya bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menjalankan fungsi:

a. pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung hutan dan hasil hutan di wilayah ekoregion;

b. pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung pertambangan, energi, pertanian, kelautan di wilayah ekoregion;

c. pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung transportasi, manufaktur, industri dan jasa di wilayah ekoregion; dan

d. penyiapan bahan pelaporan kinerja bidang inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.

Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas 3 (tiga) sub bidang :

a. Subbidang Hutan dan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan

pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya hutan dan hasil hutan

- b. Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya pertambangan, energi, pertanian dan kelautan.
 - c. Subbidang Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya transportasi, manufaktur, industri dan jasa.
3. Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perencanaan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan sumberdaya hutan dan hasil hutan;
 - b. penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan sumber daya pertambangan, energi, pertanian, kelautan;
 - c. penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan sumber daya transportasi, manufaktur, industri dan jasa; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang perencanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas 3 (tiga) sub bidang :

- a. Subbidang Hutan dan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana dan penerapan pengelolaan hutan dan hasil hutan.
- b. Subbidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka

penyiapan bahan penyusunan rencana dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya pertambangan, energi, pertanian dan kelautan.

- c. Subbidang Transportasi, Manufaktur, Industri dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana dan penerapan rencana pengelolaan sumber daya pengelolaan transportasi, manufaktur, industri dan jasa.
4. Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi, uji kualitas lingkungan, dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan uji kualitas lingkungan;
 - c. tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas 3 (tiga) sub bidang :

- a. Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Subbidang Uji Kualitas Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan uji kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. Subbidang Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan unit kegiatan di lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan diberikan penanggung jawab kepada bagian/bidang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Unit Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan di P3E Bali dan Nusra

No.	Unit Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Inventarisasi dan dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah ekoregion	Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.	Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan HIidup di Wilayah Ekoregion	Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
3.	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4.	Penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan BMN	Bagian Tata Usaha

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020

2.1 Capaian Indikator Kinerja 2019

Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, dan telah disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Jenderal – KLHK yang merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara tahun 2015-2019, diharapkan tugas pokok dan fungsi dapat dilakukan secara terarah dan terkendali dalam mengakomodasi permasalahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.

Untuk mencapai kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan sasaran dan indikator kinerja program yang akan dilaksanakan oleh tingkat eselon 1 dilingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran dan indikator kinerja program Sekretariat Jenderal (setjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion untuk tahun 2015-2019.

Strategi yang akan digunakan agar arah kebijakan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2019 menjadi tepat sasaran dijabarkan dalam Rencana strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara 2015-2019, untuk mengacu kepada Sasaran dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Renstra eselon 2 satker mandiri hanya menyusun "sasaran dan indikator kegiatan, sasaran dan indikator unit kegiatan serta sasaran dan indikator kinerja elemen kegiatan".

Adapun sasaran dan indikator kinerja kegiatan, sasaran dan indikator kinerja unit kegiatan serta sasaran dan indikator kinerja elemen kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara – KLHK sebagai berikut :

2.1.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran kegiatan ditetapkan untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan. Sasaran kegiatan menggambarkan kondisi yang harus dicapai dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran dan indikator kinerja kegiatan, unit kegiatan dan elemen kegiatan Pusat serta capaian target 2019 dapat dilihat dalam tabel 2

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra (K10)	Meningkatnya pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Bali Nusra (S1,S2,S3.P13.K10)	Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali Nusra 95% (S1,S2,S3.P13.K10.IKK.a)	persen	95
		Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan DDDT berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Bali-Nusra selama 5 tahun (S1,S2,S3.P13.K10.IKK.b)	Dokumen (tematik)	8 (akumulasi)

Sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, P3E Bali Nusra telah mencapai capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2015-2019 baik Indikator Kinerja Kegiatan 1 (S1,S2,S3.P13.K10.IKK.a) maupun Indikator Kinerja 2 (S1,S2,S3.P13.K10.IKK.b). Capaian yang diperoleh P3E Bali Nusra pada Tahun 2016, sebagaimana pada tabel 3.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA. 2019

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja 2017		
				T	R	%
Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra (K10)	Meningkatnya pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Bali Nusra (S1,S2,S3.P13.K10)					
		Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali Nusra 95% (S1,S2,S3.P13.K10.IKK.a)	Persen	95 %	85,35 %	89,84 %
		Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan DDDT berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Bali-Nusra selama 5 tahun (S1,S2,S3.P13.K10.IKK.b)	Dokumen (tematik)	2	2	100
		Rerata Realisasi Capaian				94,92

Tabel 4. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019

No	Kegiatan/Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
1	Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Inventarisasi Daya Dukung dan Daya Tampung LH dan SDA. - Inventarisasi data dan penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung SDA dan Lingkungan Hidup Pulau Bali - Pengembangan dan diseminasi SILH	Tersedianya data dan informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan berbasis jasa ekosistem	a. Data dan Informasi DDDT yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan di di Pulau Bali	Dokumen	1	13.965.050.000 ,- 721.185.000,-
			b. Desiminasi DDDT Pulau Bali	Instansi	1 Prov, 3 Kab/Kota	
			c. Tersedianya sistem database yang akurat dan terbaru (<i>up to date</i>)	sistem	1	
2	Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup. - Penyusunan rencana pengelolaan SDA dan LH di Ekoregion Bali dan Nusra	Terlaksananya rencana pengelolaan SDA dan LH berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Rencana Pengelolaan SDA dan LH Berbasis DDDT	Dokumen	2	759.000.000,-
			Jumlah <i>stakeholders</i> yang menerapkan rencana pengelolaan SDA dan LH berdasarkan	Instansi	2	

No	Kegiatan/Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
			DDDT dan instrumen LHK lainnya			
3	Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDA & LH. - Evaluasi pencapaian sasaran program KLHK di Ekoregion Bali dan Nusra. - Pelaksanaan pemantauan lingkungan (kualitas air) dalam rangka pengembangan penyusunan SLHD. - Pengembangan laboratorium pengujian kualitas lingkungan di Ekoregion Bali dan Nusra. - Pelaksanaan Tindak lanjut penguatan kelembagaan pengelolaan SDA dan LH	1. Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan pengelolaan SDA dan LH di wilayah ekoregion Balinusra 2. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara 3. Terlaksananya tindak lanjut pengelolaan SDA dan LH	Data dan informasi capaian sasaran program LHK (UPT,BLH dan Dishut) Tersedianya Data IKLH ekoregion Hasil evaluasi yang ditindak lanjuti	Persentase Dokumen/laporan Persentase	50 1 20	866.644.000,-
4	Pelaksanaan pelayanan umum yang handal, efisien dan efektif	Meningkatnya pelayanan umum perkantoran yang handal, efisien dan efektif	Jumlah dokumen Perencanaan Program dan anggaran, RKAKL, LAKIP, Renstra, Laporan Keuangan, Umum dan Kepegawaian, BMN dan Kehumasan yang handal, efisien dan efektif	Dokumen/laporan	9	1.486.500.000,-

2.1.2 Capaian Indikator Kegiatan pada Unit Kegiatan

Sesuai dengan Renja 2018 yang telah dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan nusa Tenggara, maka perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2016 dan progres capaian Renstra 2015-2019 sampai dengan 2018, pada

Kegiatan Pengendalian Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, sebagaimana pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan dan Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 sampai dengan 2019.

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja 2019			Kinerja 2015-2019		
				T	R	%	T	R	%
Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra	Meningkatnya pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Bali Nusra	Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali Nusra 95%	persen	95	76,43	84,92	95	82,11	89,59
		Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan DDDT berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Bali-Nusra selama 5 tahun	Dokumen (tematik)	2	2	100	8	9	112
		Rerata Realisasi Capaian				92,46			100,8

Tabel 6. Pencapaian Kinerja Unit Kegiatan Inventarisasi DDDT dan Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 samapai dengan 2019.

Unit Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja 2019			Kinerja 2015-2019 s/d 2019		
				T	R	%	T	R	%
Inventarisasi daya dukung dan daya tampung (DDDT)	Tersedianya dan termanfaatkannya data dan informasi DDDT berbasis jasa ekosistem	Tersedianya data dan informasi DDDT di ekoregion Bali dan Nusra	Dokumen	2	3	150	8	9	112
		Jumlah Pemda yang didesiminasi	Provinsi dan kota/kab	1 dan 20	1 dan 20	100	3 dan 20	3 dan 20	100
		Tersedianya sistem database yang ter up to date	Laporan	1	1	100	5	5	100
		Rerata Realisasi Capaian					116		

Tabel 7. Pencapaian Kinerja Unit Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan SDA dan LH dan Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 sampai dengan 2019.

Unit Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja 2019			Kinerja 2015-2019		
				T	R	%	T	R	%
Perencanaan Penyusunan Pengelolaan SDA dan LH	Terlaksananya perencanaan pengelolaan SDA & LH berdasarkan DDDT lingkungan Ekoregion Bali dan Nusra)	Jumlah perencanaan & pengelolaan SDA & LH berbasis DDDT	Dokumen	2	2	100	8	9	112
		Jumlah stakeholder yang menerapkan rencana pengelolaan SDA & LH berdasarkan DDDT dan instrumen LHK lainnya	Institusi	2	2	100	8	10	125
		Rerata Realisasi Capaian					100		

Tabel 8. Pencapaian Unit Kegiatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDA dan LH dan Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 samapai dengan 2019.

Unit Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja 2019			Kinerja 2015-2019 s/d 2019		
				T	R	%	T	R	%
Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDA dan LH	Terlaksanya evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan SDA & LH di wilayah ekoregion Bali dan Nusra yang efektif dan efisien	Data dan informasi capaian sasaran strategis LHK	Dokumen	1	1	100	5	5	100
		Tersedianya data IKLH ekoregion yang <i>up to date</i> dan dipublikasikan	Dokumen	1	1	100	5	5	100
		Hasil evaluasi kualitas lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen	40	40	100	100	100	100
Rerata Realisasi Capaian					100			100	

Tabel 9. Pencapaian Kinerja Unit Kegiatan Penyelenggaraan Tata Laksana Perkantoran dan Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 sampai dengan 2019.

Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Terinventarisasinya data dan penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung dan Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem	1. Data DDDT dan LH di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	2 Dokumen	3 Dokumen	150
Terlaksananya sosialisasi DDDT di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	2. Jumlah Pemda yang didesiminasi	3 Prov, 20 Kab/ Kota	3 Prov, 20 Kab/ Kota	100
Meningkatnya sarana sistem informasi LHK di Ekoregion BaliNusra	3. Tersedianya sistem database yang akurat dan terbaru (<i>up to date</i>)	1 laporan	1 laporan	100
Tersusunya rencana pengelolaan SDA dan LH di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	Jumlah Rencana Pengelolaan SDA dan LH Berbasis DDDT	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Terlaksananya penerapan pengelolaan SDA dan LH di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	Jumlah stakeholder yang menerapkan rencana pengelolaan SDA & LH berdasarkan DDDT dan instrumen LHK lainnya	2 Instansi	2 instansi	100
Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan pengelolaan SDA dan LH di wilayah ekoregion Balinusra	Data dan informasi capaian sasaran program LHK (UPT,BLH dan Dishut)	3 Dokumen	3 Dokumen	100
Meningkatnya kapasitas laboratorium lingkungan daerah di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah lab provinsi dan kab/kota yang mampu melakukan pengujian	4 labortorium	4 labrtorium	100
Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, udara dan tutupan lahan)	Tersedianya Data IKLH ekoregion	1 (8 akumulatif) sungai dan danau	1 (8 akumulatif) sungai dan danau	100
	Jumlah kota yang dipantau	1 (5 akumulatif) kota	1 (5 akumulatif) kota/kab.	100
	Jumlah lokasi tutupan lahan yang dipantau	3 lokasi	3 lokasi	100
Terlaksananya tindak lanjut pengelolaan SDA dan LH	Hasil evaluasi yang ditindak lanjuti	2 stakeholder/ pemda	5 stakeholder/ pemda	250
Meningkatnya pelayanan umum perkantoran yang handal, efisien dan efektif	Jumlah dokumen Perencanaan Program dan anggaran, RKAKL, LKJ, Laporan Keuangan, Umum dan Kepegawaian, BMN dan Kehumasan yang handal, efisien dan efektif	10 Dokumen/ Laporan	10 Dokumen/ laporan	100

2.2.3 Capaian Indikator Kegiatan pada Elemen Unit Kegiatan

Sesuai dengan Renja 2018 yang telah dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, maka capaian kinerja pada elemen kegiatan, sebagaimana pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10 Capaian Kinerja Elemen Kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusra 2019.

Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Kinerja Elemen Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Terinventarisasinya data dan penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung dan Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem	4. Data DDDT dan LH di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	2 Dokumen	3 Dokumen	150
Terlaksananya sosialisasi DDDT di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	5. Jumlah Pemda yang didesiminasi	1 Prov, 3 Kab/ Kota	1 Prov, 3 Kab/ Kota	100
Meningkatnya sarana sistem informasi LHK di Ekoregion BaliNusra	6. Tersedianya sistem database yang akurat dan terbaru (<i>up to date</i>)	1 laporan	1 laporan	100
Tersusunya rencana pengelolaan SDA dan LH di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	Jumlah Rencana Pengelolaan SDA dan LH Berbasis DDDT	2 Dokumen	3 Dokumen	150
Terlaksananya penerapan pengelolaan SDA dan LH di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	Jumlah stakeholder yang menerapkan rencana pengelolaan SDA & LH berdasarkan DDDT dan instrumen LHK lainnya	2 Instansi	2 instansi	100
Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan pengelolaan SDA dan LH di wilayah ekoregion Balinusra	Data dan informasi capaian sasaran program LHK (UPT,BLH dan Dishut)	3 Dokumen	3 Dokumen	100
Meningkatnya kapasitas laboratorium lingkungan daerah di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah lab provinsi dan kab/kota yang mampu melakukan pengujian	1 laporan (11 lab)	1 laporan (11 lab)	100
Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan (air sungai)	Tersedianya Data IKLH ekoregion	1 laporan (5 sungai/ danau)	1 laporan (5 sungai/ danau)	100
Terlaksananya tindak lanjut pengelolaan SDA dan LH	Hasil evaluasi yang ditindak lanjuti	5 stakeholder	5 stakeholder	100
Meningkatnya pelayanan umum perkantoran yang handal, efisien dan efektif	Jumlah dokumen Perencanaan Program dan anggaran, RKAKL, LAKIP, Renstra, Laporan Keuangan, Umum dan Kepegawaian, BMN dan Kehumasan yang handal, efisien dan efektif	10 Dokumen/ Laporan	10 Dokumen/ laporan	100

2.2 Progres Capaian Renstra 2015-2019 sampai dengan Tahun 2019

Secara umum hasil capaian kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Progres Renstra 2015-2019, telah sebagian besar telah memenuhi target, bahkan beberapa melebihi target sehingga rata-rata capaian progres Renstra 2015-2019 sampai dengan 2017 sebagai berikut :

1. Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 samapai dengan 2019 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebesar 100,8%
2. Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 samapai dengan 2019 pada Unit Kegiatan Inventarisasi DDDT sebesar 104%
3. Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 samapai dengan 2019 pada Unit Kegiatan Rencana Pengelolaan SDA dan LH sebesar 118%
4. Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 samapai dengan 2019 pada Unit Kegiatan Evaluasi Capaian Sasaran Strategis KLHK dan Tindak Lanjut PSDALH sebesar 100%
5. Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2015-2019 samapai dengan 2019 pada Unit Kegiatan Tata Laksana Perkantoran sebesar 100%

2.3 Prognosis Capaian Kinerja 2020

Berdasarkan pemantuan Sistem Aplikasi Satker (SAS) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan per tanggal 31 Oktober 2020, bahwa serapan anggaran P3E Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi per output, maka realisasi anggaran yang tertinggi terdapat pada output "Layanan Sarana dan Prasarana Internal" dengan realisasinya sebesar 99,99% dan realisasi anggaran terendah terdapat pada outuput "Layanan Dukungan Manajemen Eselon II" sebesar 55,81 %. Hal ini disebabkan karena adanya rencana kegiatan yang sedang dilakukan pelaksanaannya, sehingga total realisasi anggaran per 31 Oktober 2020 sebesar 76,10 %, tabel 11.

Tabel 11. Realisasi anggaran per 30 Oktober 2020 per output.

No	Nama Output	Anggaran		Persen (%)
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Base Line)	623.697.000	599.171.315	96.07
2.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon (Baseline)	879.937.000	491.077.694	55.81
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	471.366.000	471.315.200	99,99
4.	Layanan Perkantoran	10.442.308.000	7.887.838.259	75.54
Total		12.417.308.000	9.449.402.468	76.10

Untuk realisasi output (fisik) kegiatan tidak diisi tiap bulan untuk output "Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Base Line)" dengan target kumulatif 3 dokumen untuk tahun 2020, maka karena adanya penghematan/*refocusing* anggaran 2020 untuk percepatan penanganan pencegahan dan penanggulangan COVID 19 sehingga target capaian output diturunkan menjadi 3 Dokumen untuk tahun anggaran 2020, sedangkan realisasi fisik kegiatan tiap bulan tidak diisi karena akan diisi pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui capaian kinerja pada Rencana Kerja Tahunan. Untuk realisasi fisik kegiatan per 31 Oktober tahun 2020 rata – rata progresnya sebesar 76%

Berdasarkan aplikasi SAS dan SMART Kementerian Keuangan bahwa realisasi fisik progres tertinggi terdapat pada output "Layanan Sarana dan Prasarana Internal" sebesar 100% dan realisasi anggaran terendah terdapat pada output "Layanan Dukungan Manajemen eselon 1/Satker" sebesar 60%, pada tabel 12.

Tabel 12. Realisasi dan progres Output per 31 Oktober 2020

No	Nama Output	Output			Ket
		Target	Realisasi	Progres	
1.	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	-	97 %	
2.	Layanan Dukungan Manajemen eselon 1/Satker	1 Layanan	-	60 %	
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12 Bulan	100 %	100 %	
	Layanan Perkantoran	1 Layanan			
Rata-rata progres		-	-	76%	

BAB III

RENCANA KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA KLHK 2020

Rencana Kerja (Renja) 2021 diinput pada aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) yang merupakan integrasi antara 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/lembaga yang dituangkan dalam bentuk sistem aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. Aplikasi KRISNA digunakan dalam proses penyusunan Renja K/L tahun 2021 yang selanjutnya akan menjadi referensi bagi penyusunan RKA K/L TA. 2021. Aplikasi KRISNA mempunyai fungsi sebagai alat bantu bagi K/L dalam proses penyusunan (*input* dan *update*) Renja K/L. Pengisian aplikasi KRISNA dilakukan sampai level Program, sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO) meliputi target, volume, satuan dan lokasi pelaksanaannya baik untuk output prioritas nasional maupun output non prioritas. Khusus untuk output prioritas nasional, apabila ada perubahan di luar kesepakatan *trilateral meeting* maka dibutuhkan persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu selama tidak mengurangi target yang disepakati, apabila ada pengurangan target PN maka harus mendapatkan persetujuan Presiden. Dengan adanya aplikasi KRISNA ini diharapkan proses perencanaan akan lebih terintegrasi, efektif dan terukur pencapaiannya di lapangan sehingga memberikan manfaat yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara luas.

Dalam konteks RKP 2021 bidang lingkungan hidup dan kehutanan, maka untuk menjamin tercapainya Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, telah disusun 19 kegiatan beserta sasaran dan indikatornya di dalam Renstra KLHK 2020-2024, salah satunya yaitu kegiatan "Pengendalian Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara" dengan sasarannya "Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.

3.1 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pengendalian ekoregion Bali dan Nusa Tenggara adalah Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, dengan indikator kinerja kegiatan “jumlah dokumen pengendalian pembangunan ekoregion Bali dan Nusa Tenggara” dan indikator kinerja kegiatan yaitu: (1) hasil inventarisasi dan perhitungan DDDT di Wilayah Ekoregion; (2) rencana pengelolaan SDALH di Wilayah Ekoregion; (3) hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemangunan LHK dan Penerapan Program Strategis KLHK. (4) tingkat kepuasan layanan publik

Berdasarkan pandangan dan harapan berbagai pihak serta permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan selama ini di wilayah kerja ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, maka Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara telah diarahkan untuk melaksanakan capaian sasaran kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kebidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan telah jabarkan Program Sekretaris Jenderal yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan sasaran programnya “meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” dan selanjutnya jabarkan dalam sasaran kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara yaitu Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dengan indikatornya ‘jumlah rencana pengendalian pembangunan ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dan sub indikator kinerja kegiatannya; (1) hasil inventarisasi dan perhitungan DDDT di Wilayah Ekoregion; (2) rencana pengelolaan SDALH di Wilayah Ekoregion; (3) hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemangunan LHK dan Penerapan Program Strategis KLHK; (4) tingkat kepuasan layanan publik

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan

lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan ekoregion;
2. Pelaksanaan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
3. Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion; dan
4. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta arahan program dan sasaran kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka sasaran kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yaitu meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dan dijabarkan dalam sasaran unit kegiatan sebagai berikut :

1. Tersedianya data dan informasi dan perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) di wilayah ekoregion Bali dan Nusra;
2. Terlaksananya perencanaan pengelolaan SDA dan LH berdasarkan DDDT di wilayah ekoregion Bali dan Nusra;
3. Terlaksananya evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Progam Strategis LHK di wilayah ekoregion Bali dan Nusra; dan
4. Tatalaksana operasional perkantoran yang efektif dan efisien.

3.2 Komponen Kegiatan

Unit kegiatan, Sasaran dan indikator kinerja unit kegiatan yang ditetapkan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, dimaksudkan untuk pengukuran ketercapaian sasaran dan indinkator kinerja kegiatan. Sasaran unit kegiatan menggambarkan kondisi yang harus dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.

Untuk menjamin tercapainya Sasran Kegiatan, maka telah disusun unit kegiatan, elemen kegiatan, sasaran dan indikator kinerja, sebagaimana pada tabel 13.

Tabel 13. Output dan Komponen Kegiatan Pusat Pengendalian Ekoregion Bali dan Nusra 2020-2024

No	Ouput dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
1.	Inventarisasi SDALH dan Perhungan DDDT di Wilayah Ekoregion BaliNusra	Terinventarisasi dan terhitungnya Daya Dukung dan Daya Tampung SDALH di wilayah ekoregion BaliNusra	Jumlah dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung SDALH di ekoregion Balinusra
2.	Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan inventarisasi dan perhitungan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Terfasilitasinya pemerintah daerah dalam penyusunan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Pemerintah Daerah yang menyusun perencanaan pembangunan berbasis DDDT
3.	Penyusunan rencana pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Ekoregion Bali dan Nusra	Tersusunnya rencana pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah rencana pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di ekoregion Bali Nusra
4.	Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	Terlaksananya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Pemerintah Daerah yang menyusun perencanaan pembangunan (RPPLH dan KLHS) berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra
5.	Evaluasi Pengelolaan SDALH	Terlaksananya pengumpulan dan analisis data informasi bahan evaluasi pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	Data dan informasi pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra
6.	Pemantauan kualitas lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas Ekoregion BaliNusra	Jumlah lokasi yang dipantau
7.	Tindak lanjut hasil evaluasi	Terlaksananya tindak lanjut pengelolaan SDA dan LH di ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah hasil evaluasi yang ditindak lanjuti dalam pengelolaan SDALH
8.	Tingkat Kepuasan Layanan Publik	Terlaksananya survei tingkat kepuasan layanan publik terhadap kegiatan P3E BaliNusra	Jumlah poin hasil survei tingkat kepuasan layanan publik terhadap kegiatan P3E BaliNusra

No	Ouput dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan
Layanan Dukungan Manajemen Satker			
1.	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi program dan anggaran di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Dokumen RENSTRA P3E Bali & Nusa Tenggara 2020-2024
			Jumlah Dokumen RENJA
			Jumlah Dokumen TOR dan RKAKL
			Jumlah Dokumen KRISNA
			Jumlah Laporan LKj
			Jumlah Laporan Triwulan P39 Bapenas
2.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, DAK dan kegiatan lainnya	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, DAK dan kegiatan lainnya
			Jumlah laporan keuangan
			Jumlah laporan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis
			Jumlah laporan peningkatan pengelolaan kepegawaian dilingkup P3E BaliNusra
			Jumlah laporan kepegawaian
			Jumlah laporan BMN
3.	Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya penataan layanan umum & perlengkapan	Jumlah laporan kehumasan
			Jumlah laporan kehumasan
Layanan Sarana Internal			
1.	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor	Jumlah unit kendaraan bermotor
2.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Terlaksananya pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	Jumlah unit peralatan dan fasilitas perkantoran
Layanan Perkantoran			
1.	Pembayaran gaji dan tunjangan	Terlaksananya kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN lingkup P3E BaliNusra
3.	Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran (pemayaran PDAM, Tlp, Listrik, ATK dan lainnya).
			Terlaksananya pemeliharaan perkantoran (komputer, AC, taman, kendaraan, dan lainnya)

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja unit kegiatan tersebut, maka berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-533/MK.02/2020 tertanggal 16 Agustus 2020 perihal Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 serta memperhatikan arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, bahwa pagu anggaran Satuan Kerja Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK sebesar Rp15.392.308.000 dengan rincian pada tabel 14.

Tabel 14. Struktur Anggaran Berdasarkan Belanja Renja TA. 2021

No	URAIAN BELANJA	JUMLAH ANGGARAN	KET.
1.	Belanja Pegawai	7.039.407.000	
2.	Belanja Operasional	3.738.110.000	
3.	Belanja Non Operasional	4.250.000.000	
Total		15.027.517.000	

Di tahun 2021, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara memiliki peranan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam konteks pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah, tidak hanya sebagai koordinator tetapi sebagai eksekutor yang mampu memberikan koreksi terhadap kebijakan pembangunan di daerah berkerjasama dengan UPT dan Pemda serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat dalam pengendalian pembangunan di wilayah kerjanya sehingga dapat meminimalkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Di samping itu, P3E merupakan perwakilan Setjen di daerah yang harus mampu mengkoordinasikan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah baik yang dilaksanakan oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SKPD maupun oleh instansi terkait lain dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sampai ke tingkat tapak di KPH, DAS, Taman Nasional, dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian P3E menjamin bahwa kebijakan Menteri dan Eselon I berjalan dengan baik di daerah. Untuk

meningkatkan peran P3E di dalam pembangunan LHK, diharapkan dapat melakukan pemetaan peran, tugas dan fungsi P3E dari hulu sampai hilir terkait dengan pembangunan LHK dalam kerangka ekoregion sebagai suatu unit kelestarian dan juga P3E wajib memberikan bimbingan di dalam perhitungan IKLH di daerah sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan LHK.

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2021 merupakan tahun kedua diterapkan integrasi Rencana Kerja (Renja) dan Informasi Kinerja Anggaran yang dituangkan dalam aplikasi KRISNA dengan RKAKL. Nomenklatur, volume, satuan output/komponen, lokus dan besaran anggaran di dalam aplikasi KRISNA merupakan referensi di dalam penyusunan dokumen RKAK/L yang otomatis bisa ditransformasikan, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya sama.

Disusunnya Rencana Kerja 2021, melalui pendekatan-pendekatan di atas, dan untuk memastikan pencapaian target dan sasaran yang termuat dalam Renstra P3E Bali dan Nusa Tenggara KLHK 2020-2024, maka Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK akan berupaya melakukan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan melalui dukungan alokasi anggaran, regulasi dan sumberdaya manusia yang ada untuk mensukseskan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dan Prognosis Capaian Kinerja 2020 merupakan salah satu modal utama untuk pelaksanaan rencana kerja tahun 2021, sehingga diharapkan dapat melaksanakan kegiatan yang lebih baik lagi untuk pencapaian target yang ditetapkan dan berdampak positif yang dapat bermanfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk memastikan upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.



Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Drs. Rijaluzzaman
NIP. 19601228 199203 1 001

BAB V

LAMPIRAN

Matriks Rencana Kerja Pusat Pengendalian Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dan Anggarannya pada masing-masing unit kegiatan untuk Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut.

Tabel 16. Matriks Rencana Kerja (Renja) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2021

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Komponen Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi Anggaran
Kegiatan: Pengendalian pembangunan LHK Regional				15.027.517.000,-
Sasaran Kegiatan: Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali dan Nusra				
	1. Inventarisasi dan Perhitungan DDDTLH di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusra	Dokumen	2	
	2. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	Dokumen	2	
	3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen	1	
	4. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E BaliNusa	Poin	4	
	Output 1: Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Pemda	41	2.608.909.000,-
	1. Inventarisasi dan Perhitungan DDDTLH di Wilayah Ekoregion Bali dan Nus Tenggara	Dokumen	2	800.000.000,-
	2. Fasilitas Pemerintah Daerah dalam penyusunan inventarisasi dan perhitungan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Pemda	3	135.360.000,-
	3. Penyusunan rencana pengelolaan SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Dokumen	2	873.266.000,-
	4. Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	Pemda	3	60.434.000,-
	5. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	Dokumen	1	266.000.000,-
	6. Pemantauan kualitas lingkungan	Laporan	1	221.999.000,-
	7. Tindak lanjut hasil evaluasi	Laporan	1	302.000.000,-
	8. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E BaliNusa	Poin	4	
	Output 2: Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	5	1.222.852.000,-
	1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Dokumen/laporan	9	235.030.000,-
	2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen/laporan	2	614.852.000,-
	3. Pengelolaan Keuangan	Dokumen/laporan	2	172.832.000,-
	4. Pengelolaan Kepegawaian	Dokumen/laporan	12	101.332.000,-
	5. Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Dokumen/laporan	3	99.454.000,-

	Output 3: Layanan Sarana Internal	Layanan	2	558.241.000,-
	<i>1. Pengadaan Kendaraan Bermotor</i>	Unit	2	46.600.000,-
	<i>2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran</i>	Unit	27	349.141.000,-
	Output 4: Layanan Perkantoran	Layanan	2	10.777.517.000,-
	<i>1. Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>	Layanan	12	7.039.407.000,-
	<i>2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</i>	Layanan	12	3.738.110.000,-



**Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion Bali Dan Nusa Tenggara
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Jln. Ir. H. Juanda, Niti Mandala Renon, Denpasar-Bali 80236
Telp. 0361-228237, Fax. 0361-243448
Email : p3ebalinusra@gmail.com
Website : <http://ppebalinusra.menlh.go.id>**